

Strategi Efektif Dalam Manajemen Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Oto Subrata

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang, Banten, Indonesia

Email: otosubratasubardi@gmail.com

Abstrak indonesia

Manajemen keuangan di tingkat desa merupakan langkah strategis pembangunan desa berkelanjutan. Pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi kunci dalam mengoptimalkan penggunaan Dana Desa serta Pendapatan Asli Desa (PAD). Artikel ini membahas strategi efektif dalam manajemen keuangan desa berdasarkan prinsip good governance serta penggunaan teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan di desa. Penelitian diselesaikan dengan metode kualitatif dengan studi kasus di beberapa desa di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan desa dengan tatakelola yang baik cenderung memiliki pembangunan yang lebih merata dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Diperlukan sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang optimal.

Kata Kunci: Manajemen keuangan desa, transparansi, akuntabilitas, pembangunan berkelanjutan, good governance

Abstract English

Village financial management is a strategic step in achieving sustainable rural development. Transparent, accountable, and participatory financial management is key to optimizing the use of Village Funds and Village Original Revenue (PAD). This article discusses effective strategies for village financial management based on the principles of good governance and the use of digital technology to enhance transparency and efficiency in financial administration. The research was conducted using a qualitative method with case studies in several villages in Indonesia. Findings indicate that villages with good governance tend to have more equitable development and improved community welfare. Synergy between village governments, communities, and other stakeholders is essential to ensure optimal village financial management.

Keywords: Village financial management, transparency, accountability, sustainable development, good governance.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa yang berkelanjutan merupakan langkah strategis dalam menciptakan kesejahteraan dimasyarakat tingkat lokal (Chikmawati, 2019; Pradani, 2020). Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sistem manajemen keuangan yang efektif guna memastikan setiap dana yang diterima desa dapat dimanfaatkan secara optimal. Desa di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keuangan desa bersumber dari berbagai pendapatan, seperti Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat, Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah daerah,

Pendapatan Asli Desa (PAD), serta sumber lainnya yang sah (Aziz, 2016; Zainul, A, 2018). Dengan adanya otonomi keuangan ini, desa memiliki fleksibilitas dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, meskipun memiliki kewenangan penuh, banyak desa masih menghadapi berbagai kendala dalam mengelola keuangannya secara transparan dan akuntabel.

Salah satu tantangan utama dalam manajemen keuangan desa adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Beberapa desa masih belum memiliki sistem yang jelas dalam menginformasikan penggunaan dana desa kepada masyarakat, sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan anggaran (et al., 2018). Selain itu, lemahnya akuntabilitas dalam pelaporan keuangan juga menjadi masalah serius. Masih terdapat kasus di mana laporan penggunaan anggaran tidak disusun dengan baik atau bahkan tidak tersedia bagi masyarakat, sehingga pengawasan menjadi sulit dilakukan. Akibatnya, berbagai program pembangunan desa tidak berjalan dengan optimal dan sering kali menimbulkan ketidakpuasan di kalangan warga. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan regulasi yang lebih ketat serta pengawasan yang lebih baik agar pengelolaan keuangan desa dapat mensejahterakan masyarakat.

Selain masalah transparansi dan akuntabilitas, rendahnya partisipasi juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas pembangunan desa (Lazar et al., 2024). Padahal, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran desa. Kurangnya keterlibatan masyarakat sering kali disebabkan oleh minimnya akses terhadap informasi anggaran desa serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pengawasan terhadap keuangan desa (Lazar et al., 2024). Oleh karena itu, pemerintah desa harus lebih proaktif dalam mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan anggaran melalui musyawarah desa, publikasi laporan keuangan secara terbuka, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh semua warga.

Berdasarkan laporan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, beberapa desa di Indonesia masih menghadapi kendala besar dalam pemanfaatan Dana Desa (Saragih & Agung, 2017). Salah satu penyebab utama adalah keterbatasan kapasitas SDM di desa, terutama dalam aspek administrasi keuangan. Banyak perangkat desa yang belum memiliki keterampilan yang memadai dalam menyusun laporan keuangan, melakukan perencanaan anggaran, serta memahami regulasi yang berlaku (Hulu et al., 2018). Selain itu, sistem pengawasan internal di tingkat desa masih lemah, sehingga penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa sulit untuk dideteksi sejak dini. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memperbaiki tata kelola keuangan desa. Pelatihan dan pendampingan bagi aparatur desa dalam bidang manajemen keuangan dan teknologi informasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola anggaran desa secara profesional.

Upaya memastikan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik, diperlukan strategi yang efektif dan berbasis prinsip *good governance* (Ira Megasyara & Amrizal Imawan, 2023). Strategi ini mencakup peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa melalui pemanfaatan teknologi digital, seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Platform ini memungkinkan pencatatan dan pelaporan penggunaan dana desa secara lebih sistematis, akurat, dan efisien. Selain itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat, baik dari lembaga pemerintah maupun partisipasi aktif masyarakat, untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana. Pemerintah desa juga harus mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan anggaran agar tercipta rasa memiliki serta tanggung jawab bersama dalam pembangunan desa. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, desa dapat memastikan bahwa setiap dana yang diterima

benar-benar digunakan secara optimal untuk pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

LANDASAN TEORI

Manajemen Keuangan Desa

Manajemen keuangan desa merupakan aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan desa yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dana yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Arifian & Djasuli, 2024). Manajemen keuangan desa mencakup beberapa tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan anggaran desa (Rivan & Ridwan Maksum, 2019). Dalam perencanaan, pemerintah desa harus menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat serta sejalan dengan kebijakan pembangunan desa (Juardi M et al., 2018). Pada tahap pelaksanaan, anggaran desa direalisasikan sesuai rencana dengan memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah supradesa, seperti inspektorat daerah dan BPK, serta melibatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan transparansi. Dengan sistem pengawasan yang ketat, potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa dapat diminimalkan. Terakhir, evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas dan dampak penggunaan anggaran desa terhadap pembangunan, sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan keuangan desa di tahun berikutnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa wajib mengelola anggaran desa secara transparan dan akuntabel (Hanifah & Praptoyo, 2015). Namun, dalam implementasinya, masih banyak desa yang menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya kapasitas sumber daya manusia dalam administrasi keuangan, lemahnya sistem pengawasan, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan kapasitas aparatur desa dan penguatan sistem tata kelola keuangan agar manajemen keuangan desa dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Good Governance dalam Manajemen Keuangan Desa

Good governance menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab (Utomo et al., 2018; Yudastio, 2021). Konsep ini meliputi lima prinsip utama, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi (Dasor, 2018). Transparansi dalam manajemen keuangan desa berarti bahwa seluruh informasi mengenai anggaran, penggunaan dana, serta hasil pembangunan desa harus dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan laporan keuangan secara berkala dan mengumumkannya melalui media desa, seperti papan informasi atau situs web resmi desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa menuntut pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana kepada masyarakat dan pihak terkait, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan anggaran (Dasor, 2018). Namun, tantangan utama dalam penerapan good governance adalah masih adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam tata kelola pemerintahan desa, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta komitmen yang kuat dari pemerintah desa untuk mengelola keuangan secara jujur dan profesional.

Penggunaan Teknologi dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu solusi inovatif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pencatatan dan

pengelolaan anggaran desa (Susano & Rachmawati, 2024). Salah satu teknologi yang telah diterapkan secara luas adalah Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan secara lebih sistematis dan terintegrasi (Mukhsin, 2020). Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa bertanggung jawab untuk merealisasikan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga dana yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan terhadap penggunaan dana desa dilakukan oleh pemerintah supradesa, seperti inspektorat daerah dan BPK, guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta melibatkan masyarakat melalui mekanisme partisipatif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya sistem pengawasan yang ketat dan keterlibatan aktif berbagai pihak, potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa dapat diminimalkan, sehingga tercipta tata kelola keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan. Selain Siskeudes, beberapa desa juga telah mulai mengembangkan sistem informasi berbasis web yang memungkinkan warga desa untuk mengakses informasi anggaran desa secara real-time, sehingga meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa. Penerapan teknologi dalam tata kelola keuangan desa tidak hanya mempercepat proses administrasi keuangan, tetapi juga membantu dalam perencanaan anggaran yang lebih akurat berdasarkan data dan analisis yang valid. Namun, tantangan dalam digitalisasi manajemen keuangan desa adalah masih adanya keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah serta rendahnya tingkat literasi digital di kalangan aparat desa. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan teknologi harus terus ditingkatkan agar desa-desa di seluruh Indonesia dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional dan modern.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Handayani, 2020) dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam bagaimana manajemen keuangan desa dijalankan di berbagai wilayah di Indonesia. Studi ini berfokus pada dua kategori desa, yaitu desa-desa yang telah berhasil menerapkan praktik manajemen keuangan yang baik serta desa-desa yang masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dalam tata kelola keuangan desa, tetapi juga mengeksplorasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh desa yang belum optimal dalam mengelola anggaran mereka. Penggunaan metode studi kasus memungkinkan analisis yang lebih rinci mengenai dinamika pengelolaan keuangan di tingkat desa, termasuk bagaimana kebijakan keuangan diterapkan, sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas dijalankan, serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran desa.

Pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan kepala desa, perangkat desa, serta warga setempat untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, data sekunder mencakup berbagai dokumen resmi, seperti laporan keuangan desa, laporan tahunan, serta regulasi yang mengatur tata kelola keuangan desa. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif (Handayani, 2020) untuk mengidentifikasi pola-pola manajemen keuangan desa yang efektif serta mengungkap berbagai tantangan yang masih menjadi hambatan dalam pengelolaan anggaran desa. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi

strategis bagi pemerintah desa, lembaga pengawas, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memperbaiki sistem manajemen keuangan desa agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

PEMBAHASAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek krusial dalam pembangunan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan (Shadrina & Hidajat, 2023). Sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat lokal, desa mengelola anggaran yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), serta pendapatan asli desa yang harus digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan keuangan desa masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia hingga rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran. Studi ini berupaya mengkaji lebih dalam mengenai beberapa aspek utama dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk transparansi, pemanfaatan teknologi, partisipasi masyarakat, serta tantangan yang dihadapi. Memahami berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan. Dengan analisis yang mendalam, rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dapat dirancang untuk mengatasi permasalahan yang ada. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola keuangan desa secara menyeluruh, sehingga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaannya.

Transparansi merupakan prinsip utama dalam tata kelola keuangan desa yang berfungsi untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Hasil studi ini menunjukkan bahwa desa-desa yang menerapkan transparansi keuangan melalui pemasangan papan informasi anggaran di lokasi strategis dan penggunaan website desa untuk mengunggah laporan keuangan cenderung mendapatkan kepercayaan lebih besar dari masyarakat. Dengan meningkatnya kepercayaan ini, partisipasi warga dalam perencanaan dan pengawasan keuangan desa juga semakin aktif, sehingga mendukung pengelolaan dana yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya akses terbuka terhadap informasi anggaran, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa dialokasikan dan digunakan, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan dana. Selain itu, transparansi yang baik juga meningkatkan partisipasi warga dalam pengawasan anggaran, karena mereka merasa memiliki kepentingan dalam pembangunan desa. Namun, tidak semua desa memiliki sistem transparansi yang optimal. Beberapa desa masih menghadapi kendala, seperti kurangnya akses terhadap teknologi informasi atau rendahnya kesadaran aparatur desa dalam menyampaikan informasi anggaran secara terbuka kepada masyarakat.

Penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa telah membawa perubahan signifikan dalam efektivitas pencatatan dan pelaporan keuangan. Salah satu inovasi yang telah banyak diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa adalah Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), sebuah platform digital yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Studi ini menemukan bahwa desa yang menggunakan Siskeudes mengalami peningkatan dalam akurasi pencatatan keuangan, kecepatan dalam pembuatan laporan keuangan, serta kemudahan dalam proses audit. Seorang perangkat desa yang diwawancarai menyatakan, "Dulu, kami sering mengalami kesalahan pencatatan karena dilakukan secara manual. Sekarang, dengan Siskeudes, pencatatan menjadi lebih akurat dan laporan keuangan bisa dibuat lebih cepat tanpa harus memeriksa ulang secara berulang." Selain itu, proses audit juga menjadi lebih efisien karena data keuangan tersimpan dengan rapi dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak berwenang. Namun, tantangan utama dalam implementasi teknologi ini adalah keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa. Banyak

perangkat desa yang belum memiliki keterampilan yang memadai dalam mengoperasikan sistem digital, sehingga mereka masih bergantung pada metode pencatatan manual atau membutuhkan pendampingan dalam penggunaan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan dukungan teknis yang berkelanjutan agar seluruh desa dapat memanfaatkan teknologi secara optimal dalam pengelolaan keuangan mereka.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desa-desa yang memiliki mekanisme keterlibatan warga dalam perencanaan dan pengawasan keuangan cenderung lebih efisien dalam mengalokasikan dana desa untuk program-program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi yang umum ditemukan adalah musyawarah desa, di mana warga dapat menyampaikan aspirasi mereka terkait prioritas pembangunan. Selain itu, pengawasan langsung oleh masyarakat juga berperan dalam memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai dengan perencanaan. Namun, partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan di beberapa desa, terutama di wilayah dengan tingkat literasi keuangan yang rendah. Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengawasan anggaran menyebabkan masyarakat cenderung pasif dan kurang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar sistem tata kelola berjalan lebih efektif. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan, di mana banyak aparatur desa belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip akuntansi, pelaporan keuangan, serta regulasi terkait dana desa. Seorang kepala desa yang diwawancarai mengungkapkan, "Kami sering kali kesulitan dalam menyusun laporan keuangan karena tidak semua perangkat desa memiliki latar belakang akuntansi. Pelatihan sudah ada, tetapi masih terbatas dan belum cukup untuk menguasai semua aspek yang dibutuhkan." Selain itu, lemahnya sistem pengawasan juga menjadi kendala signifikan, karena kurangnya kontrol yang efektif dapat membuka peluang bagi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Dalam beberapa kasus, kurangnya pengawasan menyebabkan ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran atau bahkan membuka peluang terjadinya penyimpangan dana. Selain itu, minimnya edukasi keuangan di tingkat desa juga menghambat partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran. Warga desa yang kurang memahami sistem keuangan sering kali tidak menyadari hak mereka untuk mengakses informasi keuangan desa atau tidak memiliki kapasitas untuk menilai apakah anggaran telah dikelola dengan baik.

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, pemerintah desa menerapkan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat regulasi terkait keterbukaan informasi anggaran. Desa wajib menyediakan laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat, baik melalui media cetak, papan informasi, maupun platform digital. Selain itu, pelaksanaan audit rutin oleh lembaga pengawas, seperti inspektorat daerah, juga perlu diperkuat guna memastikan bahwa setiap dana digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Meningkatkan keterampilan aparatur desa dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Pelatihan berkala mengenai tata kelola keuangan desa akan membantu meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam menjalankan tugas mereka secara profesional.

Selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa, peran pemerintah pusat dan lembaga pengawas juga sangat penting dalam memastikan efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan dalam bentuk regulasi yang lebih jelas dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat meningkatkan frekuensi audit serta memberikan rekomendasi yang lebih konkret bagi desa-desa yang mengalami kesulitan dalam mengelola anggaran. Selain itu, pendampingan oleh tenaga ahli keuangan desa dapat membantu desa dalam meningkatkan sistem administrasi keuangan mereka. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil juga dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesadaran dan kapasitas keuangan di tingkat desa.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik sangat bergantung pada transparansi, penggunaan teknologi, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran. Desa-desa yang telah menerapkan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangannya menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi dalam penggunaan anggaran. Namun, masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, serta minimnya edukasi keuangan di tingkat desa. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung penguatan regulasi transparansi, pengembangan kapasitas aparatur desa, serta optimalisasi peran masyarakat dalam pengawasan keuangan perlu diimplementasikan secara lebih luas. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran aktif semua pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, perangkat desa, serta masyarakat, sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem manajemen keuangan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa manajemen keuangan desa yang efektif berperan penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Faktor utama yang berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa mencakup transparansi dalam pelaporan anggaran, akuntabilitas dalam penggunaan dana, pemanfaatan teknologi digital seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), serta partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan keuangan desa. Studi ini memberikan kontribusi baru dengan menyoroti bagaimana integrasi teknologi dan keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas tata kelola keuangan desa, yang masih jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bahwa tantangan utama dalam pengelolaan keuangan desa, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan lemahnya sistem pengawasan, dapat diatasi melalui kebijakan yang mendorong peningkatan kompetensi aparatur desa dan optimalisasi mekanisme pengawasan berbasis komunitas. Implikasi dari temuan ini mengarah pada perlunya kebijakan yang lebih komprehensif dalam memperkuat regulasi transparansi anggaran, memperluas akses pelatihan bagi perangkat desa, serta membangun sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas tata kelola keuangan desa. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan desa dapat mengelola keuangannya secara lebih efisien dan memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI:

Arifian, B. N., & Djasuli, M. (2024). Implementasi Asy-Syu 'ara dalam Good Village Governance Sebagai Upaya Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 3531–3546.

- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Fund. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211.
- Chikmawati, Z. (2019). Peran BUMDes dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui penguatan sumber daya manusia. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 101–113.
- Dasor, Y. W. (2018). Implementasi Good Governance dalam Manajemen Berbasis Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 10(2), 172–183. [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-11\(41\)-238-251](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-11(41)-238-251)
- Handayani, R. (2020). Metode Penelitian Sosial. In *Bandung* (Issue September).
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8).
- Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (2018). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. 10(1), 146–154. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>
- Ira Megasyara, & Amrizal Imawan. (2023). Implementasi Good Government Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 13(2), 512–528. <https://doi.org/10.22219/jrak.v13i2.23525>
- Juardi M, Muchlis M, & Putri R. (2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskedus Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, IV(1), 1. <https://e-journal.unair.ac.id/jraba/article/view/46039/24892>
- Lazar, F. C. T., Token, F. B., & Niron, E. S. (2024). Relasi Kuasa Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lamabelawa. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 8(2), 219–239.
- Mukhsin, M. (2020). Peranan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Menerapkan Sistem Informasi Desa Dalam Publikasi Informasi Desa Di Era Globalisasi. *Teknokom*, 3(1), 7–15. <https://doi.org/10.31943/teknokom.v3i1.43>
- Pradani, R. F. E. (2020). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. *Juornal of Economics and Policy Studies*, 1(1), 23–33. <https://doi.org/10.21274/jeps.v1i1.3429>
- Rivan, A., & Ridwan Maksum, I. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management. *Public Administration Journal*, 9(2), 92–100. <http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487><http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>
- Saragih, R., & Agung, S. (2017). Peran Komunikasi politik Pemerintah dalam Upaya Peningkatan Partisipatif Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa. *Vol. 7 No. 1 (2017)*, 7(1), 59–69.
- Shadrina, H. N., & Hidajat, S. (2023). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 459. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.873>

- Susano, A., & Rachmawati, M. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 50–58. <https://doi.org/10.36596/ekobis.v12i1.1382>
- Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136–155. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009>
- Utomo, K. S., -, S. S., & Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 50. <https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22924>
- Yudastio. (2021). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 6, 77–88.
- Zainul, A, M. (2018). Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komerin Ilir, Sumatra Selatan. *Jurnal Thengkyang*, 1(1), 2–22.